



PERAN KEBIJAKAN MONETER DALAM MENJAGA STABILITAS EKONOMI DAN PERTUMBUHAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA

Devi Oktaviani

Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Bunga Bangsa Cirebon

Almas Sabila Putri

Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Bunga Bangsa Cirebon

Louis Anugrah Nusantara Goeltom

Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Bunga Bangsa Cirebon

Siti Nurfaidah

Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Bunga Bangsa Cirebon

Korespondensi penulis: devioktaviani18@gmail.com, almassabilaputri1998@gmail.com,
louisgoeltom8@gmail.com, snurfaidah693@gmail.com

Abstract. *The monetary sector and policy play a vital role in maintaining a nation's economic stability and fostering sustainable growth. Monetary policy, as implemented by central banks, aims to regulate money supply, interest rates, and inflation to ensure macroeconomic equilibrium. In recent years, the effectiveness of monetary instruments has been tested by global financial volatility, exchange rate fluctuations, and domestic fiscal pressures. This study explores the interaction between the monetary sector and policy decisions, analyzing how strategic adjustments in monetary tools such as open market operations, reserve requirements, and benchmark interest rates affect inflation control, investment growth, and public consumption patterns. The discussion also highlights the role of monetary transmission mechanisms and coordination with fiscal policy to optimize policy outcomes. The findings suggest that consistent, transparent, and adaptive monetary policies are essential in stabilizing financial systems and supporting long-term economic resilience.*

Keywords: Monetary Policy; Economic Stability; Inflation Control; Interest Rate; Central Bank

Abstrak. Sektor dan kebijakan moneter memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara serta mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Kebijakan moneter yang dijalankan oleh bank sentral bertujuan untuk mengatur jumlah uang yang beredar, suku bunga, dan tingkat inflasi agar tercapai keseimbangan makroekonomi. Dalam beberapa tahun terakhir, efektivitas instrumen moneter diuji oleh dinamika keuangan global, fluktuasi nilai tukar, serta tekanan fiskal domestik. Penelitian ini mengkaji keterkaitan antara sektor moneter dan kebijakan yang diambil, dengan menganalisis bagaimana penyesuaian strategis pada instrumen seperti operasi pasar terbuka, giro wajib minimum, dan suku bunga acuan mempengaruhi pengendalian inflasi, pertumbuhan investasi, serta pola konsumsi masyarakat. Pembahasan juga menyoroti mekanisme transmisi kebijakan moneter dan koordinasinya dengan kebijakan fiskal untuk mengoptimalkan hasil kebijakan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan moneter yang konsisten, transparan, dan adaptif sangat diperlukan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung ketahanan ekonomi jangka panjang.

Kata Kunci: Kebijakan Moneter; Stabilitas Ekonomi; Pengendalian Inflasi; Suku Bunga; Bank Sentral

PENDAHULUAN

Sektor moneter merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi suatu negara yang memiliki peranan strategis dalam menjaga stabilitas makroekonomi serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks ekonomi modern yang semakin kompleks dan dinamis, kebijakan moneter menjadi instrumen penting yang digunakan oleh bank sentral untuk mencapai berbagai tujuan ekonomi, seperti stabilitas harga, peningkatan kesempatan kerja, keseimbangan neraca pembayaran, serta pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

Melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dan penetapan suku bunga acuan, kebijakan moneter berfungsi sebagai mekanisme pengendali terhadap tekanan inflasi dan fluktuasi ekonomi yang dapat mengganggu keseimbangan pasar keuangan (Nurbaiti, 2025).

Perkembangan sektor moneter tidak dapat dilepaskan dari dinamika global yang terus berubah. Globalisasi ekonomi, integrasi pasar keuangan, serta kemajuan teknologi digital telah mempengaruhi efektivitas dan arah kebijakan moneter di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam beberapa dekade terakhir, volatilitas nilai tukar, pergerakan modal lintas negara, serta ketidakpastian ekonomi global menjadi tantangan besar bagi otoritas moneter. Kondisi tersebut menuntut adanya kebijakan moneter yang adaptif, responsif, dan terkoordinasi dengan kebijakan fiskal agar tujuan ekonomi nasional tetap tercapai. Sebagai contoh, krisis keuangan global tahun 2008 dan pandemi COVID-19 telah memberikan pelajaran penting mengenai pentingnya fleksibilitas kebijakan moneter dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pemulihan ekonomi (Nurbaiti, 2025).

Di Indonesia kebijakan moneter diatur dan dijalankan oleh Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter yang independen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Tujuan utama kebijakan moneter di Indonesia adalah mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah. Stabilitas nilai rupiah memiliki dua dimensi penting, yaitu stabilitas terhadap harga barang dan jasa yang tercermin melalui tingkat inflasi, serta stabilitas terhadap mata uang asing yang tercermin melalui nilai tukar. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia menggunakan berbagai instrumen kebijakan seperti operasi pasar terbuka, penetapan suku bunga acuan (BI Rate atau saat ini BI-Rate/BI7DRR), intervensi di pasar valuta asing serta penetapan giro wajib minimum bagi perbankan (Latif, 2024).

Implementasi kebijakan moneter sering kali menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Salah satu tantangan utama adalah adanya keterbatasan dalam transmisi kebijakan moneter terhadap sektor riil. Mekanisme transmisi moneter yang lambat atau tidak efektif dapat menghambat pencapaian tujuan kebijakan, terutama ketika kondisi ekonomi mengalami tekanan eksternal seperti inflasi impor, ketidakstabilan harga komoditas global, atau gejolak politik dan sosial. Selain itu, adanya ketergantungan terhadap modal asing jangka pendek dan peran besar sektor perbankan dalam sistem keuangan domestik juga membuat kebijakan moneter harus dijalankan secara hati-hati agar tidak menimbulkan risiko sistemik yang lebih besar (Latif, 2024).

Peran sektor moneter juga semakin penting dalam menghadapi era digitalisasi keuangan. Munculnya inovasi seperti financial technology (fintech), sistem pembayaran digital, dan mata uang kripto telah mengubah cara masyarakat bertransaksi dan menyimpan nilai. Hal ini menuntut otoritas moneter untuk melakukan adaptasi kebijakan agar tetap efektif dalam mengendalikan likuiditas dan menjaga stabilitas sistem pembayaran nasional. Bank Indonesia, misalnya, telah merespons perkembangan ini dengan meluncurkan kebijakan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025, yang bertujuan memperkuat integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional (Nurbaiti, 2025).

Kebijakan moneter tidak dapat berdiri sendiri tanpa koordinasi yang erat dengan kebijakan fiskal. Hubungan antara kebijakan moneter dan fiskal sering kali bersifat saling melengkapi, di mana kebijakan fiskal yang ekspansif dapat meningkatkan efektivitas kebijakan moneter dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sedangkan kebijakan fiskal yang terlalu longgar dapat menimbulkan tekanan inflasi yang justru menghambat tujuan stabilitas moneter. Oleh karena itu,

sinkronisasi antara kedua kebijakan tersebut menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan ekonomi makro (Nurbaiti, 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana sektor moneter dan kebijakan moneter berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi serta mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menelusuri makna, konteks, dan dinamika kebijakan moneter secara lebih komprehensif melalui analisis terhadap data sekunder dan interpretasi konseptual. Pendekatan ini tidak berfokus pada pengujian hipotesis kuantitatif, melainkan pada eksplorasi mendalam terhadap fenomena ekonomi yang kompleks dan saling berkaitan antara kebijakan moneter, sektor keuangan, dan kondisi makroekonomi.

Jenis penelitian ini bersifat studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik sektor dan kebijakan moneter. Sumber data yang digunakan terdiri atas data sekunder yang diperoleh dari berbagai publikasi resmi, seperti laporan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik (BPS), serta publikasi internasional dari Bank for International Settlements (BIS) dan International Monetary Fund (IMF). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan referensi dari berbagai jurnal ilmiah, buku teks ekonomi moneter, dan artikel akademik terbaru yang membahas mengenai teori, instrumen, serta efektivitas kebijakan moneter di tingkat nasional maupun global (Hakiki et al., 2024).

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan data yang diperoleh, kemudian menafsirkan maknanya berdasarkan teori ekonomi moneter dan kebijakan publik. Tahapan analisis meliputi reduksi data, yaitu proses pemilihan dan penyederhanaan informasi penting dari berbagai sumber literatur; penyajian data dalam bentuk narasi dan tabel ringkasan indikator ekonomi; serta penarikan kesimpulan yang bersifat interpretatif dan konseptual. Analisis ini diarahkan untuk memahami hubungan antara kebijakan moneter dengan sektor keuangan dan ekonomi riil, serta menilai efektivitas instrumen moneter seperti suku bunga acuan, operasi pasar terbuka, dan pengaturan cadangan wajib minimum terhadap stabilitas ekonomi nasional (Hakiki et al., 2024).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Sektor Moneter dan Perkembangannya di Indonesia

Sektor moneter di Indonesia memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi nasional. Sebagai bagian dari sistem keuangan, sektor ini mencakup lembaga perbankan, lembaga pembiayaan, dan instrumen pasar uang yang berfungsi untuk mengatur sirkulasi likuiditas dan mendukung pembiayaan ekonomi. Berdasarkan data Bank Indonesia (2024), stabilitas moneter Indonesia relatif terjaga dengan tingkat inflasi yang berada dalam kisaran sasaran $2,5 \pm 1$ persen. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga menunjukkan kestabilan yang cukup baik dibandingkan periode krisis sebelumnya, meskipun masih terpengaruh oleh dinamika global seperti kenaikan suku bunga acuan The Fed dan fluktuasi harga komoditas (Winarto et al., 2021).

Salah satu capaian penting sektor moneter dalam beberapa tahun terakhir adalah keberhasilan menjaga inflasi inti pada level rendah melalui kebijakan suku bunga yang terukur dan penguatan komunikasi kebijakan publik. Namun, tantangan tetap ada, terutama dari sisi eksternal seperti ketidakpastian geopolitik, pelemahan perdagangan global, dan pergerakan modal

jangka pendek yang sensitif terhadap perubahan suku bunga global. Di sisi lain, sektor keuangan digital juga berkembang pesat dengan munculnya sistem pembayaran elektronik, e-wallet, dan platform keuangan digital yang mengubah struktur sirkulasi uang di masyarakat. Perkembangan ini menunjukkan bahwa sistem moneter Indonesia sedang berada dalam masa transisi menuju era digital, yang menuntut kebijakan moneter semakin adaptif dan inklusif.

2. Instrumen dan Mekanisme Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter di Indonesia dijalankan oleh Bank Indonesia melalui berbagai instrumen utama yang mencakup operasi pasar terbuka (OPT), penetapan suku bunga acuan (BI-Rate atau BI7DRR), penetapan giro wajib minimum (GWM), serta intervensi nilai tukar. Setiap instrumen memiliki peran berbeda dalam memengaruhi jumlah uang beredar dan stabilitas sistem keuangan. Instrumen operasi pasar terbuka digunakan untuk mengatur likuiditas jangka pendek di pasar uang melalui kegiatan jual-beli surat berharga negara (SBN). Ketika tekanan inflasi meningkat, Bank Indonesia akan menjual surat berharga untuk menyerap kelebihan likuiditas; sebaliknya, ketika ekonomi melambat, bank sentral akan membeli surat berharga untuk menambah pasokan uang beredar. Selain itu, kebijakan suku bunga acuan (BI7DRR) berfungsi sebagai sinyal utama arah kebijakan moneter. Kenaikan suku bunga acuan akan menahan tekanan inflasi, namun di sisi lain dapat menekan pertumbuhan kredit dan investasi. Oleh karena itu, Bank Indonesia selalu menyesuaikan kebijakan suku bunga berdasarkan keseimbangan antara stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi (Budiyanti, 2014).

Instrumen Giro Wajib Minimum (GWM) digunakan untuk mengontrol cadangan likuiditas perbankan. Dengan menaikkan GWM, Bank Indonesia dapat menekan kemampuan bank untuk menyalurkan kredit, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Intervensi di pasar valuta asing juga menjadi langkah penting dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Seluruh mekanisme tersebut berjalan melalui proses transmisi kebijakan moneter, yaitu bagaimana perubahan kebijakan bank sentral memengaruhi suku bunga perbankan, permintaan kredit, investasi, konsumsi, hingga akhirnya berdampak pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

3. Dampak Kebijakan Moneter terhadap Stabilitas Ekonomi

Efektivitas kebijakan moneter dapat dilihat dari kemampuannya dalam menjaga stabilitas harga, menekan volatilitas nilai tukar, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat. Berdasarkan analisis data makroekonomi Indonesia periode 2020–2024, kebijakan moneter yang dijalankan oleh Bank Indonesia terbukti cukup efektif dalam menekan inflasi yang sempat melonjak akibat pandemi COVID-19 dan gangguan pasokan global. Melalui strategi triple intervention yakni intervensi di pasar valas, obligasi pemerintah, dan likuiditas perbankan Bank Indonesia berhasil menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil meskipun menghadapi tekanan eksternal.

Penurunan suku bunga acuan secara bertahap selama masa pandemi berhasil menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pemulihan sektor riil. Namun, setelah pemulihan ekonomi berlangsung, kebijakan moneter kembali diketatkan untuk mengendalikan potensi overheating ekonomi. Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa arah kebijakan moneter di Indonesia telah beralih dari reaktif menjadi forward-looking policy, yakni kebijakan yang mempertimbangkan proyeksi ekonomi ke depan, bukan hanya respon terhadap kondisi saat ini. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam efektivitas transmisi kebijakan moneter, terutama karena tingkat inklusi keuangan yang belum merata dan dominasi kredit konsumtif di sektor perbankan. Keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal

menyebabkan kebijakan moneter tidak selalu berdampak langsung ke seluruh lapisan ekonomi. Oleh karena itu, penguatan sinergi antara kebijakan moneter, fiskal, dan kebijakan sektor keuangan menjadi sangat penting untuk memastikan dampak kebijakan dapat dirasakan secara luas (Hadi, 2017).

4. Koordinasi Kebijakan Moneter dan Fiskal

Temuan penting dalam penelitian ini adalah bahwa koordinasi antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal menjadi faktor penentu keberhasilan pengelolaan ekonomi makro. Kebijakan fiskal yang dijalankan oleh pemerintah melalui pengeluaran negara, subsidi, dan perpajakan harus selaras dengan arah kebijakan moneter yang ditempuh Bank Indonesia. Ketidakseimbangan antara keduanya dapat menimbulkan tekanan inflasi, defisit anggaran, atau ketidakstabilan pasar keuangan. Pada masa pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan fiskal ekspansif melalui stimulus ekonomi dan bantuan sosial, sementara Bank Indonesia mendukung kebijakan tersebut dengan pelonggaran moneter, termasuk penurunan suku bunga dan pembelian surat berharga negara. Koordinasi yang baik antara kedua kebijakan tersebut mampu mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Akan tetapi, di masa pascapandemi, ketika tekanan inflasi meningkat akibat lonjakan harga pangan dan energi global, kebijakan fiskal harus kembali dikendalikan agar tidak menambah tekanan terhadap inflasi. Hal ini membuktikan pentingnya komunikasi dan koordinasi antarlembaga dalam menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang (Lubis et al., 2024).

5. Tantangan dan Arah Kebijakan Moneter di Masa Depan

Ke depannya sektor moneter Indonesia menghadapi sejumlah tantangan baru seiring dengan perkembangan ekonomi digital, perubahan iklim, dan ketidakpastian geopolitik global. Transformasi digital di sektor keuangan menuntut kebijakan moneter yang mampu menyesuaikan diri dengan sistem pembayaran elektronik, munculnya Central Bank Digital Currency (CBDC), dan peningkatan aktivitas transaksi lintas batas. Selain itu, isu keberlanjutan ekonomi juga menjadi perhatian utama, di mana kebijakan moneter diharapkan dapat mendukung pembiayaan hijau dan ekonomi rendah karbon melalui insentif terhadap investasi ramah lingkungan. Bank Indonesia perlu terus memperkuat transparansi, kredibilitas, dan koordinasi dalam menjalankan kebijakan moneter agar kepercayaan publik tetap terjaga. Penguatan sistem keuangan domestik, peningkatan literasi ekonomi, serta perluasan akses keuangan inklusif menjadi bagian integral dari arah kebijakan moneter masa depan. Dengan demikian, sektor moneter tidak hanya berperan sebagai penjaga stabilitas makroekonomi, tetapi juga sebagai katalis pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan (Nurbaiti, 2025).

KESIMPULAN

Sektor dan kebijakan moneter memiliki peranan yang sangat strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Melalui kebijakan moneter yang efektif, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter mampu mengendalikan inflasi, menjaga kestabilan nilai tukar, serta menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan. Instrumen-instrumen moneter seperti operasi pasar terbuka, suku bunga acuan, dan giro wajib minimum terbukti menjadi alat penting dalam mengatur jumlah uang beredar dan mengarahkan kegiatan ekonomi agar tetap seimbang.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan moneter sangat bergantung pada kondisi ekonomi global dan domestik, serta sejauh mana kebijakan tersebut dapat

ditransmisikan ke sektor riil. Meskipun kebijakan moneter Indonesia dalam beberapa tahun terakhir relatif berhasil menjaga stabilitas makroekonomi, tantangan seperti volatilitas nilai tukar, ketergantungan pada modal asing, dan belum meratanya inklusi keuangan masih menjadi hambatan utama dalam mewujudkan stabilitas yang menyeluruh. Selain itu, perubahan struktur ekonomi akibat digitalisasi keuangan menuntut adaptasi kebijakan yang lebih fleksibel, inovatif, dan responsif terhadap dinamika baru dalam sistem moneter.

Koordinasi antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal juga menjadi faktor kunci dalam menjaga keseimbangan ekonomi makro. Ketika kedua kebijakan berjalan selaras—seperti pada masa pandemi COVID-19—dampak positif terhadap pemulihan ekonomi dapat tercapai lebih cepat dan lebih stabil. Sebaliknya, ketidaksinkronan antara keduanya berpotensi menimbulkan tekanan terhadap inflasi maupun defisit fiskal. Oleh karena itu, kebijakan moneter yang konsisten dan terkoordinasi merupakan prasyarat penting bagi keberlanjutan ekonomi nasional.

Penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan moneter yang transparan, adaptif, dan berbasis pada data (*data-driven policy*) menjadi landasan utama dalam menghadapi ketidakpastian global. Dalam jangka panjang, sektor moneter Indonesia diharapkan dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui peningkatan kredibilitas bank sentral, penguatan sistem keuangan digital, serta dukungan terhadap pembiayaan hijau dan ekonomi inklusif. Dengan demikian, kebijakan moneter tidak hanya berperan sebagai pengendali stabilitas harga, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Berdasarkan temuan penelitian mengenai peran sektor dan kebijakan moneter dalam stabilitas ekonomi dan pertumbuhan, beberapa saran yang dapat diajukan adalah:

1. Memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan fiskal, agar dampak kebijakan ekonomi lebih efektif dan stabil.
2. Meningkatkan fleksibilitas kebijakan moneter, khususnya dalam menghadapi dinamika ekonomi global dan fluktuasi pasar keuangan.
3. Mengembangkan inklusi keuangan dan literasi ekonomi masyarakat, sehingga kebijakan moneter dapat dirasakan secara merata di seluruh lapisan masyarakat.
4. Mengadaptasi kebijakan terhadap digitalisasi sektor keuangan, termasuk sistem pembayaran elektronik dan inovasi keuangan digital, untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
5. Mengoptimalkan kebijakan berbasis data dan analisis ekonomi, agar keputusan moneter lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kondisi ekonomi terkini.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiyanti, E. (2014). Pengaruh Kebijakan Moneter terhadap Kinerja Sektor Industri Manufaktur di Indonesia (*The Effect of Monetary Policy on Manufacturing Industry Sector Performance in Indonesia*). *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 5(2), 145–159.
- Hadi, S. S. (2017). Kebijakan Moneter dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia Secara Global. *Jurnal Moneter*, IV(1), 91–98.
- Hakiki, A., Suhaimi, B., Mu'ammara, N., Kurniasari, D., Indonesia, U., Sunan, U., & Djati Bandung, G. (2024). Analisis Kebijakan Moneter, Fiskal dan Inflasi pada Pertumbuhan Ekonomi. *Prestise: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang*

Ekonomi Dan Bisnis, 4(1), 41–63.

- Latif, A., & Moneter Dan Stabilitas Mata Uang Rupiah Bank Indonesia Dalam Menghadapi Tantangan Ekonomi Global, K. (2024). Kebijakan Moneter Dan Stabilitas Mata Uang Rupiah Bank Indonesia Dalam Menghadapi Tantangan Ekonomi Global. *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 166–180.
- Lubis, D. Z. S., Nasution, F. S., & ... (2024). Dampak Kebijakan Moneter terhadap Kinerja Sektor Manufaktur dan Ditinjau Secara Syariah. *Jurnal Masharif Al ...*, 9(204), 1914–1922.
- Nurbaiti, S. R. U. (2025). Studi Dampak Kebijakan Moneter terhadap Sektor Riil di Indonesia. *Circle Archive*, Vol. 1(7), 1–11.
- Winarto, H., Poernomo, A., & Prabawa, A. (2021). Analisis Dampak Kebijakan Moneter terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 6(1), 34.